

Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau

* Reynaldo Ferdinan¹, Rahyunir Rauf²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : reynaldoferdinan@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan peranan Dinas lingkungan hidup Kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan sampah di kecamatan Mandau. Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif, yang berarti bahwa jenis penelitian ini berguna untuk mengembangkan teori berdasarkan data lapangan yang sudah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan dinas lingkungan hidup kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan sampah meliputi beberapa aspek utama, yaitu sebagai regulator, fasilitator, dan pelaksanaan. Sebagai regulator dinas berperan dalam penyusunan kebijakan dan peraturan terkait pengelolaan sampah. Sebagai fasilitator, dinas menyediakan sarana dan prasarana seperti TPS, armada pengangkutan sampah, sebagai pelaksana dinas bertanggung jawab dalam kegiatan operasional pengumpulan, pengangkutan hingga pembuangan akhir sampah. Akan tetapi pelaksanaan peran tersebut belum berjalan secara optimal. Disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung serta rendahnya Tingkat kesadaran dan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Kata Kunci: Peranan, Dinas Lingkungan Hidup, Pengelolaa Sampah, Kecamatan Mandau

Abstract

This study aims to analyze and describe the role of the Bengkalis Regency Environmental Agency in waste management in Mandau District. This is a qualitative descriptive study, meaning that this type of research is useful for developing theory based on existing field data. The results of the study show that the role of the Bengkalis Regency Environmental Agency in waste management encompasses several key aspects, namely as a regulator, facilitator, and implementer. As a regulator, the agency plays a role in formulating policies and regulations related to waste management. As a facilitator, the agency provides facilities and infrastructure such as temporary waste collection sites (TPS) and a waste transport fleet; as an implementer, the agency is responsible for operational activities ranging from collection and transport to final waste disposal. However, the implementation of these roles has not yet been optimal. This is due to limitations in the quantity and quality of human resources, a lack of supporting facilities and infrastructure, as well as low levels of public awareness and participation in waste management.

Keywords: Role, Enviromental Service, Waste Management, Mandau District.

PENDAHULUAN

Saat ini sampah seolah disepelkan oleh masyarakat dalam kaitannya dengan aktivitas kehidupan sehari-hari, namun sampah ini juga memiliki banyak dampak negatif yang dapat terjadi atau dampak buruk yang ditimbulkan. Contohnya adalah degradasi lingkungan, Karena jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, timbulan sampah semakin meningkat. Selain itu, pola konsumsi masyarakat berkontribusi terhadap munculnya berbagai jenis sampah, termasuk kemasan. Bahan limbah yang sangat sulit terurai membutuhkan waktu ribuan tahun untuk hancur. (Ninef et al., 2023)

Termasuk di Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau, Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, volume sampah yang dihasilkan terus bertambah setiap harinya. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah, serta berdampak pada kesehatan masyarakat.

Kecamatan Mandau, yang terletak di Kabupaten Bengkalis, memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Pertumbuhan pesat dalam pembangunan, termasuk fasilitas ekonomi, pendidikan, perkantoran pemerintah, dan sarana olahraga, telah menyebabkan lonjakan populasi yang signifikan di Kecamatan Mandau. (Hakim & Abdullah, 2024)

Tabel 1.
Jumlah Tempat Pembuangan Sampah Sementara

NO	Tempat Pembuangan Sampah Sementara	Jumlah1
1	Pasar Mandau Sudirman	1
2	Jalan Rantau	1
3	Wonosobo/Sebanga	1
4	Polsek Mandau	1
5	Tahap Jalan 125	1
6	Jalan Suriname	1

Sumber, Olahan Penulis 2026

Kecamatan Mandau memiliki penduduk tertinggi di Kabupaten Bengkalis yaitu sebanyak 150.806 jiwa. Kepadatan penduduk di Duri dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan peningkatan volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga banyak sampah menumpuk di Kecamatan Mandau. Namun, sampah di Kecamatan Mandau tidak sepenuhnya terangkut, menyebabkan penumpukan sampah di tepi jalan yang menimbulkan bau tidak sedap. UPT Pengelolaan Sampah hanya mengangkut sampah disekitaran jalan utama, contohnya Jalan Hangtuah, Jalan Jendral Sudirman serta pertokoan dan pasar. Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis memiliki 11 Kelurahan antara lain Kelurahan Air Jamban, Babussalam, Balik Alam, Batang Serosa, Duri Barat, Duri Timur, Gajah Sakti, Pematang Pudu, Talang Mandai, Desa Bathin Betuah, dan Harapan Baru. Berdasarkan data terbaru dari monografi Kecamatan dan dokumen BPD Kabupaten Bengkalis (sekitar tahun 2020-2022) Kecamatan Mandau di Kabupaten Bengkalis memiliki satuan lingkungan setempat dengan rincian RW: 158 unit, RT 721 unit.

Tabel 2
Rasio Pengangkutan Sampah di Kecamatan Mandau

NO	Tahun	Rasio
1	2024	94.300 ton
2	2023	29.200 ton
3	2022	8.427 ton
4	2021	103.757 ton

Sumber, Data dari Kepala UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau

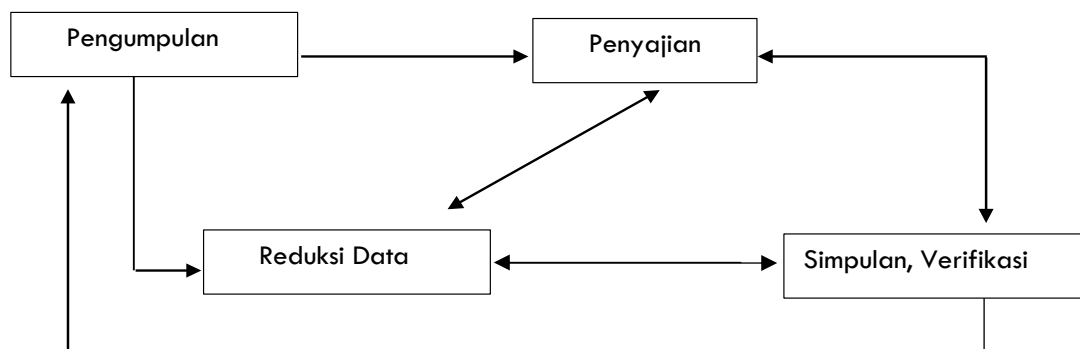
Kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah yang disediakan oleh pemerintah setempat membuat masyarakat membuat masyarakat membuang sampah sembarangan ke lahan-lahan kosong milik masyarakat lainnya. Hal ini yang menyebabkan banyak terdapat banyak tempat pembuangan sampah ilegal yang dibuat sendiri oleh masyarakat juga menggunakan badan jalan untuk membuang sampah rumah tangga seperti di jalan sudirman. (Edwin & Andriyus, 2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau (Sugiyono, 2018). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, koordinator atau pengawas kebersihan wilayah Kecamatan Mandau, petugas lapangan/kebersihan, serta masyarakat setempat selaku pengguna layanan pengelolaan sampah. Selain itu, observasi langsung di lapangan dilakukan untuk melihat kondisi nyata dari proses pengelolaan dan pengangkutan sampah yang telah dilakukan. Dokumentasi dari berbagai sumber resmi, termasuk laporan tahunan pengelolaan sampah dan data statistik volume sampah di Kecamatan Mandau, turut digunakan untuk mendukung analisis ini.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Dunn, 2003). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan program, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.

Gambar 1
Komponen-Komponen Analisis Data : Model Interaktif



Sumber : Sugiyono, 2016

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Mandau merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Bengkalis, yang secara langsung berimplikasi pada tingginya volume produksi sampah harian. Namun, lonjakan sisa konsumsi domestik ini belum mampu diimbangi secara optimal oleh sistem tata kelola lingkungan yang terintegrasi. Di sepanjang jalur protokol utama, seperti Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Hangtuah, estetika ruang publik kerap terganggu oleh fenomena penumpukan sampah di bahu jalan serta menjamurnya titik Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ilegal. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan antara laju urbanisasi, kapasitas operasional kebersihan, dan ketersediaan infrastruktur penampungan sampah resmi di lapangan.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menetapkan regulasi yang kuat melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, efektivitas penegakan aturan tersebut di tingkat tapak masih menghadapi kendala. Berdasarkan kajian teori peran Soerjono Soekanto mengenai indikator norma, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan sanksi hukum (*law enforcement*). Lemahnya sanksi tegas terhadap pelanggar tata tertib pembuangan sampah berakibat pada rendahnya efek jera, sehingga upaya preventif untuk menjaga kebersihan wilayah sering kali terhambat oleh pengabaian aturan secara berulang oleh oknum masyarakat.

Di sisi lain, potret belum optimalnya peranan dinas terkait juga dipicu oleh keterbatasan sarana prasarana penunjang dan faktor budaya masyarakat yang masih memprihatinkan. Jumlah armada pengangkut yang terbatas serta minimnya kuantitas TPS resmi memaksa sebagian warga mengambil jalan pintas dengan membuang sampah di lokasi yang tidak semestinya. Pola perilaku kultural yang menempatkan sampah di trotoar atau depan rumah ini menunjukkan bahwa kesadaran ekologis kolektif belum sepenuhnya terbentuk. Oleh karena itu, penyelesaian problem ekologi di Kecamatan Mandau tidak hanya membutuhkan penambahan fasilitas fisik semata, melainkan juga restrukturisasi budaya bersih dan penguatan komitmen koordinasi dari tingkat RT/RW, Kelurahan, hingga instansi sektoral terkait.

1. Norma

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau secara yuridis formal berlandaskan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Keberadaan regulasi ini seharusnya menjadi instrumen hukum mutlak bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah dalam mengontrol perilaku membuang sampah masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek norma ini belum berjalan optimal akibat lemahnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum (*law enforcement*) di lapangan. UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau sejauh ini masih menitikberatkan pada fungsi pelayanan pengangkutan rutin, namun belum menyentuh ranah pemberian sanksi tegas bagi pelanggar tata tertib pembuangan sampah. Ketidaktegasan dalam penerapan sanksi yang diatur dalam Perda tersebut berimplikasi pada hilangnya efek jera, sehingga keberadaan regulasi tertulis belum mampu mengeliminasi kemunculan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ilegal di sepanjang jalan protokol seperti Jalan Sudirman dan Jalan Hangtuah.

2. Individu Masyarakat sebagai Organisasi

Dilihat dari dimensi keorganisasian, efisiensi pengelolaan sampah sangat bergantung pada jalinan koordinasi dan komunikasi antar-instansi pemerintahan di tingkat lokal. Pola interaksi organisasi antara UPT Pengelolaan Sampah dengan Pemerintah Kecamatan Mandau telah terinstitusionalisasi melalui rapat koordinasi rutin yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Forum ini berfungsi sebagai media evaluasi sektoral terhadap perkembangan kebersihan wilayah. Sementara itu, integrasi komunikasi di tingkat kelurahan hingga lingkup rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) menunjukkan perkembangan positif melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan media komunikasi digital seperti WhatsApp Group terbukti mempercepat proses pelaporan dan penanganan masalah penumpukan sampah dari tingkat bawah ke pihak UPTD. Kendati jalur birokrasi dan koordinasi ini telah berjalan secara struktural, efektivitasnya di lapangan masih sering terbentur pada keterbatasan kapasitas operasional dan tindak lanjut eksekusi yang kurang responsif akibat keterbatasan armada.

3. Individu Struktur Sosial Masyarakat

Indikator struktur sosial menyoroti bagaimana peran UPT berinteraksi dengan realitas kebudayaan, partisipasi, dan kesadaran ekologis masyarakat. Temuan lapangan mengindikasikan adanya hambatan kultural yang cukup berat dalam struktur sosial masyarakat Kecamatan Mandau. Rendahnya partisipasi publik tercermin dari masih maraknya perilaku membuang sampah di luar jam operasional yang ditentukan atau menaruhnya di atas trotoar depan rumah secara sembarangan. Hambatan sosiologis ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur fisik yang disediakan oleh UPT, di mana kuantitas TPS resmi sangat minim dan tidak proporsional dengan luas wilayah serta kepadatan penduduk di Kecamatan Mandau. Jarak TPS resmi yang jauh memicu masyarakat dalam struktur sosial tersebut mengambil jalan pintas (tindakan rasional-instrumental) untuk membuang sampah di lokasi terdekat meskipun ilegal. Akibatnya, terjadi kegagalan sinergi peran antara upaya pelayanan kebersihan oleh pemerintah dan respons kepatuhan dari masyarakat selaku subjek pengelolaan lingkungan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, strategi UPT Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo dalam penanganan stunting telah dilaksanakan secara sistematis melalui perencanaan berbasis data, dengan penentuan sasaran yang cukup tepat pada balita stunting dan ibu hamil berisiko. Pelaksanaan intervensi melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), suplemen gizi, dan pemeriksaan rutin menunjukkan hasil yang cukup baik dalam mendukung perbaikan status gizi, meskipun masih dipengaruhi oleh faktor keluarga.

Pemantauan dan evaluasi program dilakukan secara berkala serta ditindaklanjuti secara adaptif, namun hasilnya belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi kondisi internal keluarga dan biologis anak. Kolaborasi lintas sektor telah berjalan cukup baik, terutama dengan kelurahan, PKK, dan kader posyandu, meskipun kerja sama dengan instansi lain masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, partisipasi masyarakat masih tergolong rendah, namun penerimaan terhadap kunjungan rumah menjadi potensi dalam meningkatkan efektivitas program.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, E.T. & McFarlane, J. (2011). Buku Ajar Keperawatan Komunitas: Teori dan Praktek. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Bungin, B. (2011). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edwin, F., & Andriyus. (2025). Evaluasi Tugas UPT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Mandau * Edwin Firman 1 , Andriyus 2 1. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, 2, 477–484.
- Hakim, Y. N., & Abdullah, S. (2024). Kinerja Pengelolaan Sampah pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis (Studi di Kecamatan Mandau). *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 588–612. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar/article/view/17549>
- Ninef, R. Y., Harton, S., & Rochim, A. I. (2023). Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya. *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*, 3(1), 40–48. <https://doi.org/10.24239/madika.v3i1.1841>
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.